

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

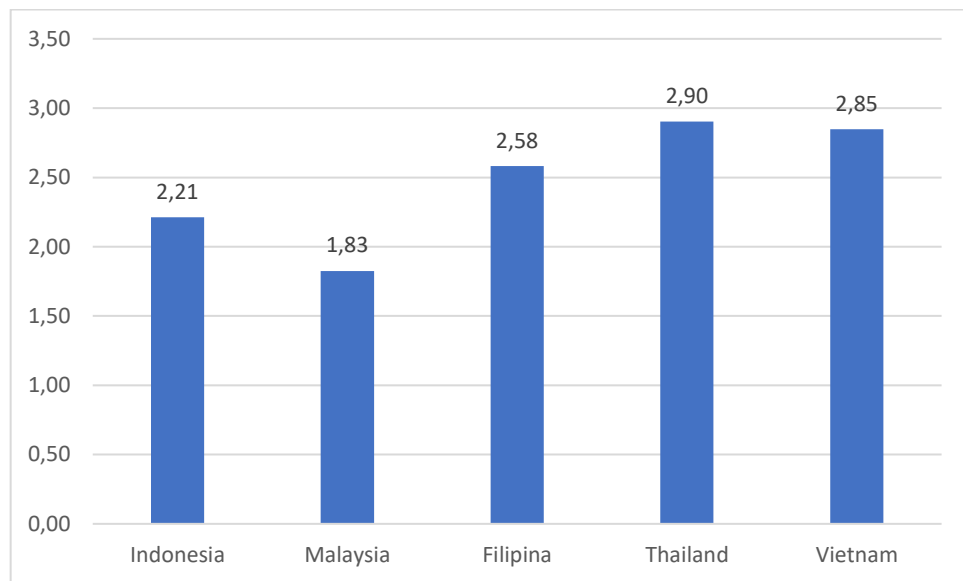
Kredit merupakan salah satu instrumen utama dalam sistem keuangan yang memiliki peran strategis dalam menunjang dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kondisi kredit di Benua asia menunjukkan kemajuan yang cepat seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang besar. Sebagai salah satu kawasan dengan ekonomi terbesar didunia, asia memiliki sektor kredit yang berkembang pesat, didorong oleh reformasi ekonomi, kebijakan moneter yang ekspansif, serta meningkatkan inklusi keuangan diberbagai negara. Sektor kredit di asia mendukung berbagai sektor, termasuk konsumsi rumah tangga, investasi infrastruktur, serta pembiayaan bagi sektor kecil dan menengah. Namun, meskipun pertumbuhan kredit di Asia secara keseluruhan menunjukkan angka yang positif, tantangan besar tetap ada, terutama terkait dengan kualitas kredit, tingkat utang yang tinggi dan potensi risiko sistemik yang dapat muncul akibat pembiayaan yang selektif (Nguyen et al., 2021).

Di sisi lain, ketergantungan penyaluran kredit pada sektor-sektor tertentu, seperti properti, energi, dan industri, turut menjadi faktor yang mempengaruhi stabilitas sektor kredit. Sejumlah negara di kawasan Asia, terutama di Asia Timur dan Asia Tenggara, menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dalam aktivitas penyaluran kredit, baik kepada sektor korporasi maupun rumah tangga. Namun demikian, peningkatan tersebut kerap diiringi oleh naiknya risiko gagal bayar, terutama di negara-negara dengan tingkat utang rumah tangga yang relatif

tinggi serta pada sektor-sektor ekonomi yang rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global (Arini, 2023).

Ketidakpastian perekonomian global serta volatilitas harga energi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap sektor kredit di kawasan Asia, terutama pada negara-negara yang memiliki tingkat ketergantungan tinggi terhadap ekspor komoditas maupun hubungan yang kuat dengan pasar energi internasional. Dalam beberapa tahun terakhir, meskipun telah dilakukan berbagai kebijakan dan langkah strategis untuk memperkuat stabilitas sistem keuangan, ketergantungan pada kebijakan moneter yang longgar serta meningkatnya tekanan inflasi menambah kompleksitas dalam pengelolaan dan pengendalian risiko kredit di kawasan tersebut (Utari & Kurniati, 2012). Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan tersebut, sektor kredit di kawasan Asia tetap menjadi salah satu pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta masih menunjukkan prospek yang cukup optimis pada masa mendatang.

Perbankan di negara-negara ASEAN senantiasa berupaya menjaga rasio *Non-Performing Loan (NPL)* agar tetap berada pada tingkat yang aman. Kenaikan rasio NPL di kawasan ASEAN dapat menjadi beban signifikan bagi kondisi keuangan perbankan, khususnya dalam kegiatan penyaluran kredit. Peningkatan rasio NPL tidak hanya mempengaruhi kinerja perbankan, tetapi juga berdampak pada stabilitas perusahaan serta perkembangan sektor ritel. Tren kenaikan NPL di negara-negara ASEAN berpotensi menimbulkan tekanan pada pasar keuangan serta memperlambat kemampuan peminjam dalam memperoleh kredit yang layak (Sukma, 2022).



Sumber: World Bank, diolah

Gambar 1. 1 Rata-rata *Non-Performing Loans (NPL)* Negara ASEAN-5, 2010-2024 (%)

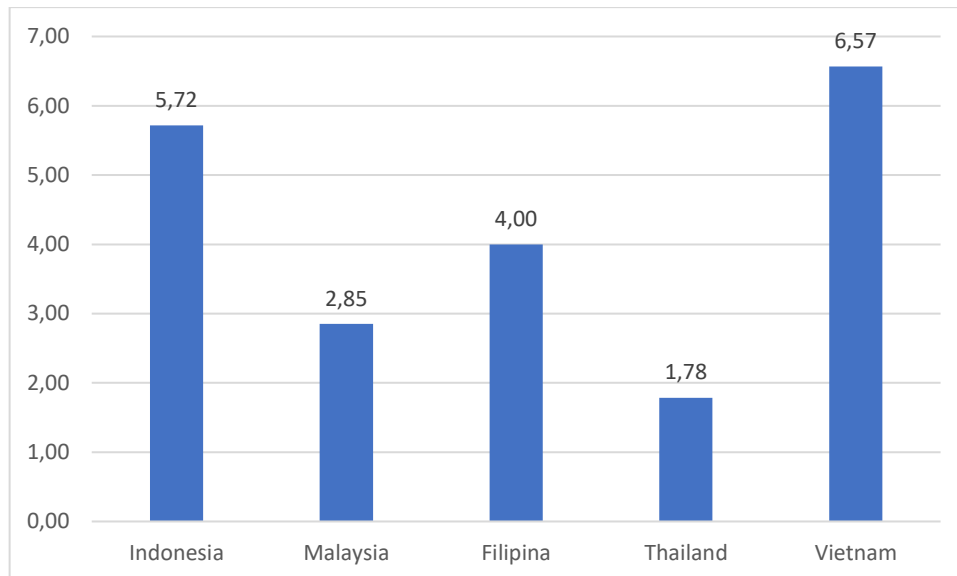
Berdasarkan Gambar 1.1, dapat dilihat rata-rata *Non-Performing Loans (NPL)* di lima negara ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam selama periode 2010–2024. Thailand mencatatkan rata-rata NPL tertinggi sebesar 2,90, diikuti oleh Vietnam sebesar 2,85, Filipina sebesar 2,58, dan Indonesia sebesar 2,21. Sementara itu, Malaysia memiliki rata-rata NPL terendah sebesar 1,83. Perbedaan tingkat NPL antarnegara tersebut mencerminkan adanya variasi dalam kualitas pengelolaan risiko kredit, kondisi makroekonomi, serta efektivitas kebijakan yang diterapkan oleh masing-masing negara. Negara dengan tingkat NPL yang relatif rendah, seperti Malaysia, menunjukkan kondisi sektor perbankan yang lebih stabil dengan kualitas kredit yang lebih baik. Sebaliknya, negara dengan tingkat NPL yang relatif tinggi, seperti Thailand dan Vietnam, menghadapi tantangan yang lebih besar dalam menjaga kualitas aset perbankan dan mengendalikan risiko kredit. Meskipun demikian, seluruh negara dalam penelitian masih memiliki rata-rata NPL di bawah 3%, yang menunjukkan bahwa secara

umum kondisi kualitas kredit perbankan di negara-negara ASEAN-5 masih berada pada kategori yang cukup terkendali.

Kebijakan moneter pada hakikatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan ekonomi yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui otoritas moneter, khususnya bank sentral, dengan tujuan mempengaruhi kondisi makroekonomi. Kebijakan ini dijalankan melalui pengendalian jumlah uang beredar serta pengaturan tingkat suku bunga di pasar uang dengan tujuan menjaga stabilitas perekonomian. Secara lebih spesifik, perangkat kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah melalui bank sentral untuk mengendalikan proses penciptaan uang agar kondisi ekonomi tetap stabil dan terkendali. Fokus utama kebijakan moneter terletak pada variabel-variabel keuangan seperti jumlah uang beredar (*money supply*), aliran kredit, serta tingkat suku bunga (Seprillina, 2016).

Kebijakan moneter berperan penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan serta mempengaruhi kinerja sektor perbankan, khususnya melalui transmisi suku bunga kebijakan (*policy rate*). Perubahan suku bunga kebijakan akan berdampak langsung terhadap biaya pinjaman, permintaan kredit, dan kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran, sehingga berpotensi mempengaruhi tingkat risiko kredit atau *Non-Performing Loans (NPL)*. Penerapan kebijakan moneter yang bersifat ketat oleh bank sentral melalui kenaikan suku bunga acuan akan meningkatkan biaya pinjaman yang harus ditanggung oleh masyarakat dan pelaku usaha. Kondisi tersebut berpotensi menurunkan kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran, sehingga dapat meningkatkan rasio kredit bermasalah (*Non-Performing Loan/NPL*). Sebaliknya, kebijakan moneter longgar dengan penurunan suku bunga mendorong ekspansi kredit dan aktivitas ekonomi, meskipun berpotensi

meningkatkan pengambilan risiko oleh bank. Oleh karena itu, analisis terhadap perkembangan suku bunga acuan di negara-negara ASEAN-5 menjadi penting untuk memahami dinamika transmisi kebijakan moneter terhadap risiko kredit perbankan di kawasan.



Sumber: International Monetary Fund, diolah

Gambar 1. 2 Rata-rata Suku Bunga Acuan Negara ASEAN-5, 2010–2024 (%)

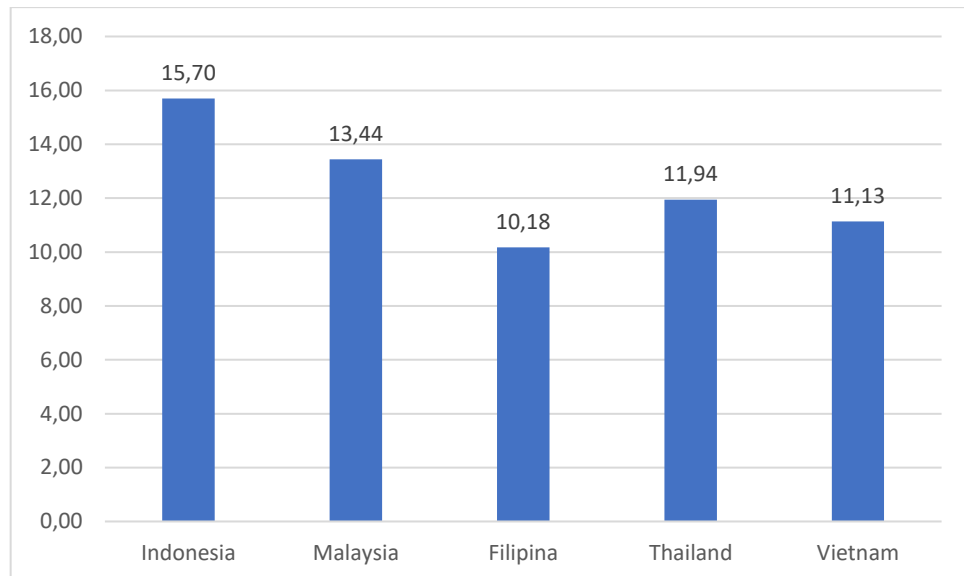
Berdasarkan Gambar 1.2, dapat dilihat rata-rata suku bunga acuan di lima negara ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam selama periode 2010–2024. Vietnam mencatatkan rata-rata suku bunga acuan tertinggi sebesar 6,57, diikuti oleh Indonesia sebesar 5,72. Selanjutnya, Filipina memiliki rata-rata suku bunga acuan sebesar 4,00, diikuti oleh Malaysia sebesar 2,85. Sementara itu, Thailand menjadi negara dengan rata-rata suku bunga acuan terendah sebesar 1,78. Perbedaan tingkat suku bunga acuan antarnegara tersebut mencerminkan variasi dalam arah kebijakan moneter, tingkat inflasi, serta kondisi perekonomian di masing-masing negara. Negara dengan suku bunga acuan yang relatif tinggi umumnya menerapkan kebijakan moneter yang lebih ketat (*tight*

monetary policy) untuk menjaga stabilitas harga dan mengendalikan tekanan inflasi. Sebaliknya, negara dengan suku bunga acuan yang lebih rendah cenderung menerapkan kebijakan moneter yang lebih longgar (*accommodative monetary policy*) guna mendorong aktivitas ekonomi dan penyaluran kredit. Oleh karena itu, perbedaan suku bunga acuan di masing-masing negara berpotensi memengaruhi perilaku perbankan dalam menyalurkan kredit serta tingkat risiko kredit yang tercermin melalui *Non-Performing Loans (NPL)*.

Kebijakan makroprudensial dan kebijakan moneter memiliki peran penting dalam membentuk sistem perbankan yang tangguh serta mampu bertahan terhadap guncangan akibat krisis. Kebijakan makroprudensial berfokus pada upaya mitigasi risiko sistemik dan pencegahan terjadinya krisis keuangan, sedangkan kebijakan moneter berperan dalam mengendalikan laju inflasi, menjaga stabilitas nilai tukar, serta mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sinergi antara kedua kebijakan tersebut menjadi faktor penting dalam mempertahankan stabilitas sistem keuangan secara berkelanjutan serta memperkuat ketahanan sektor perbankan dalam menghadapi berbagai risiko ekonomi (Zuhroh, 2025).

Salah satu instrumen kebijakan makroprudensial yang banyak digunakan untuk mengendalikan risiko kredit, khususnya dalam sektor properti yaitu *loan to value ratio*. Di kawasan ASEAN, penerapan *Loan to Value (LTV) Ratio* menjadi semakin penting seiring dengan meningkatnya permintaan kredit kepemilikan rumah dan tumbuhnya sektor perumahan. Kebijakan ini umumnya diterapkan untuk membatasi nilai pinjaman yang dapat diberikan oleh lembaga keuangan dibandingkan dengan nilai agunan, sehingga bertujuan untuk mencegah pembentukan gelembung aset dan menjaga ketahanan sistem keuangan

(Dąbrowski & Mukhlas, 2023). Meskipun terdapat perbedaan batas LTV antar negara, secara umum ASEAN menunjukkan tren yang sama yaitu penggunaan LTV sebagai alat untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan stabilitas sektor keuangan.



Sumber: International Monetary Fund, diolah

Gambar 1. 3 Rata-rata Loan to Value (LTV) Ratio Negara ASEAN-5, 2010-2024 (%)

Berdasarkan Gambar 1.3, dapat dilihat rata-rata *Loan to Value (LTV) Ratio* di lima negara ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam selama periode 2010–2024. Indonesia mencatatkan rata-rata LTV tertinggi sebesar 15,70, diikuti oleh Malaysia sebesar 13,44. Selanjutnya, Thailand memiliki rata-rata LTV sebesar 11,94, diikuti oleh Vietnam sebesar 11,13. Sementara itu, Filipina menjadi negara dengan rata-rata LTV terendah sebesar 10,18. Perbedaan tingkat LTV antarnegara tersebut mencerminkan variasi dalam kebijakan makroprudensial yang diterapkan oleh masing-masing otoritas moneter. Negara dengan tingkat LTV yang lebih tinggi mengindikasikan kebijakan yang relatif lebih

longgar dalam penyaluran kredit berbasis agunan, sehingga berpotensi mendorong peningkatan penyaluran kredit kepada masyarakat. Namun, apabila tidak diimbangi dengan penerapan manajemen risiko yang memadai, kondisi tersebut juga dapat meningkatkan risiko kredit perbankan. Sebaliknya, negara dengan tingkat LTV yang lebih rendah menunjukkan kebijakan yang relatif lebih ketat dalam mengendalikan penyaluran kredit, sehingga dapat membantu menjaga kualitas aset perbankan dan mendukung stabilitas sistem keuangan.

Selain faktor kebijakan moneter dan kebijakan makroprudensial, kondisi makroekonomi juga memiliki peran penting dalam mempengaruhi tingkat risiko kredit perbankan. Inflasi sebagai indikator stabilitas harga mencerminkan perubahan daya beli masyarakat yang dapat berdampak langsung terhadap kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban kredit. Peningkatan inflasi yang tidak terkendali berpotensi menekan pendapatan riil masyarakat dan meningkatkan biaya hidup, sehingga risiko gagal bayar cenderung meningkat dan mendorong kenaikan rasio *Non-Performing Loans (NPL)*. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi yang diproksikan dengan GDP Growth (annual %) mencerminkan laju pertumbuhan aktivitas ekonomi suatu negara dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi umumnya diikuti oleh peningkatan pendapatan masyarakat, aktivitas dunia usaha, dan kesempatan kerja sehingga kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban kredit cenderung meningkat dan risiko kredit dapat ditekan. Sebaliknya, perlambatan pertumbuhan ekonomi dapat menurunkan aktivitas ekonomi dan kemampuan pembayaran debitur sehingga berpotensi memperburuk kualitas kredit perbankan. Oleh karena itu, inflasi dan pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini digunakan sebagai variabel kontrol untuk menangkap

pengaruh kondisi makroekonomi terhadap risiko kredit perbankan di negara ASEAN-5.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mahrous et al. (2017) di kawasan MENA, kebijakan moneter yang diukur melalui suku bunga berpengaruh positif signifikan terhadap risiko kredit perbankan, di mana peningkatan suku bunga di atas ambang tertentu (6,3 persen) meningkatkan NPL secara tajam. Selanjutnya, Silalahi dan Falianty (2020) menemukan bahwa kebijakan moneter dan kebijakan makroprudensial berpengaruh signifikan terhadap perilaku pengambilan risiko bank di Indonesia; suku bunga kebijakan dan GWM menurunkan risiko perbankan, sedangkan LTV tidak signifikan. Hasil serupa diperkuat oleh Anwar et al. (2022) yang menemukan bahwa dalam jangka panjang, pengetatan kebijakan moneter meningkatkan risiko kredit (NPL), sedangkan kebijakan makroprudensial justru menekan risiko kredit, menegaskan pentingnya koordinasi kedua kebijakan tersebut untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.

Meskipun beberapa penelitian sebelumnya telah membahas pengaruh kebijakan moneter dan makroprudensial terhadap risiko kredit perbankan, sebagian besar studi tersebut masih terbatas pada konteks satu negara dan hasil penelitian yang diperoleh masih menunjukkan temuan yang belum konsisten. Penelitian di kawasan MENA, Indonesia, dan Eurozone menunjukkan bahwa kedua kebijakan berperan dalam mempengaruhi risiko kredit, namun belum banyak penelitian yang menguji interaksi kebijakan moneter dan makroprudensial secara simultan dalam konteks regional ASEAN dengan data panel dan periode terbaru. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi kesenjangan penelitian dengan menganalisis pengaruh kedua kebijakan tersebut terhadap risiko kredit perbankan di Negara ASEAN-5 menggunakan data panel periode 2010–2024.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis pengaruh kebijakan moneter yang diproksikan dengan suku bunga acuan dan kebijakan makroprudensial yang diproksikan dengan *Loan to Value (LTV)* terhadap risiko kredit perbankan pada enam negara ASEAN menggunakan data panel periode 2010–2024 dengan pendekatan *Fixed Effect Model (FEM)*, serta memasukkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel kontrol. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara empiris pengaruh kebijakan moneter dan kebijakan makroprudensial terhadap risiko kredit perbankan yang diukur melalui rasio *Non-Performing Loans (NPL)* pada enam negara utama di kawasan ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Vietnam, Thailand dan Filipina. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dalam memperluas serta memperdalam kajian akademik mengenai stabilitas sistem keuangan di kawasan Asia Tenggara, serta menjadi masukan kebijakan bagi otoritas moneter dan regulator perbankan dalam merumuskan kombinasi kebijakan yang optimal untuk menjaga ketahanan sektor perbankan dari risiko kredit dan guncangan ekonomi global.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengambil rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Apakah suku bunga acuan berpengaruh terhadap risiko kredit perbankan di negara ASEAN-5?
2. Apakah rasio *Loan to Value (LTV)* berpengaruh terhadap risiko kredit perbankan di negara ASEAN-5?
3. Apakah inflasi berpengaruh terhadap risiko kredit perbankan di negara ASEAN-5?

4. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap risiko kredit perbankan di negara ASEAN-5?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh suku bunga acuan terhadap risiko kredit Perbankan di negara ASEAN-5
2. Untuk menganalisis pengaruh rasio *Loan to Value (LTV)* terhadap risiko kredit perbankan di negara ASEAN-5
3. Untuk menganalisis pengaruh inflasi terhadap risiko kredit perbankan di negara ASEAN-5
4. Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap risiko kredit perbankan di negara ASEAN-5

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur akademik di bidang ekonomi moneter dan stabilitas keuangan, khususnya yang berkaitan dengan hubungan antara kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial, dan risiko kredit perbankan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dan otoritas moneter di negara-negara ASEAN dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan moneter serta kebijakan makroprudensial yang lebih efektif guna menekan risiko kredit

perbankan. Selain itu, temuan penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh pelaku industri perbankan sebagai bahan pertimbangan dalam pengelolaan portofolio kredit, peningkatan kualitas aset perbankan, serta penyesuaian strategi pembiayaan yang selaras dengan dinamika perkembangan kondisi ekonomi makro.